

Media Cetak	Harian Fajar
Tanggal	Kamis, 26 September 2024
Wilayah	Kabupaten Bone



## Aset Fiktif Rp1,1 M

# Aset Fiktif Rp1,1 M

**BONE, FAJAR** — Badan Pengawas Keuangan (BPK) menemukan adanya aset fiktif senilai Rp1.146.810.000 (Rp1,1 miliar) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone.

Aset tersebut merupakan sebidang lahan yang tercatat di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Bone.

Hasil Pemeriksaan Kartu Inventarisasi Barang (KIB) A (aset lahan tetap), aset tersebut tercatat diperoleh pada 2012, dengan kode barang 01.03.01.25.001 seluas 10.922 m<sup>2</sup>. Namun setelah ditelusuri di lapangan, aset ini justru tak ditemukan keberadaannya.

Kepala Bidang Aset, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bone, A Lia membenarkan adanya temuan ini. Dia mengatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan pihak Perkimtan menyoal keber-

adaan aset itu.

Lokasi dari lahan tersebut seyogianya berada di kawasan Lapangan Merdeka Jl Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang. Namun, ketika dilakukan pencarian seluruh kawasan tersebut telah bersertifikat.

Baik area perkantoran di kawasan tersebut, rumah jabatan, lapangan tenis, rumah-rumah dinas, taman bunga, hingga lapangan.

"Yang kentara itu, kan, pasti sudah bersertifikat semua, sisa itu lahan, kenapa bisa (tidak ada)," ujar Lia, Rabu, 25 September.

Kemungkinan lahan yang dimaksud senilai Rp1,1 miliar tersebut melebur ke lahan lain yang juga telah disertifikasi.

"Misal lapangan merdeka 1.500 m<sup>2</sup> luasnya, seharusnya data ini (sebagian dari lahan yang hilang) dimasukkan datanya," ujarnya.

Dengan perkara ini, pem-

kab akan melakukan kembali inventarisasi aset untuk menyelesaikan aset yang dimaksud.

Anggota DPRD Bone Andi Idris Alang angkat bicara mengenai aset ini. Dia mengatakan ini harus ditelusuri dengan serius oleh Pemkab Bone. Hal yang gawat jika ada aset yang telah tercatat dalam neraca aset, namun justru tak ditemukan di lapangan. Jangan sampai terjadi penyerobotan oleh oknum.

"Jadi ini bahaya kalau ada aset yang dicatat di neraca aset, tapi tidak ada barangnya. Fiktif," ujarnya.

Rekomendasi ini akan ditelusuri lebih lanjut oleh DPRD, pun akan dipertanyakan langsung ke Pemda dalam rapat monitoring dan evaluasi (monev) mendatang. "Jadi coba akan kita kaji dulu karena ini bahaya," tandas Politisi Golkar ini. **(an/zuk)**